

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah.

Pada tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau melaksanakan Kerja Sama atau *Memorial Of Understanding (MOU)* antar daerah dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana (KKBPK).

1. Mitra Kerja MOU.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur Bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

2. Dasar Hukum

Kebijakan dalam pelaksanaan kerjasama didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor : 1937 /HK-03.01/JI/2020 dan Nomor : 479.3/308/Dalduk/.VI/2020 Tanggal 26 bulan Februari Tahun 2020 bertempat di selyca Hotel Jln. Bhayangkara No. 58 Samarinda Tentang Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan di Kabupaten Berau.

3. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang dilakukan adalah program kerja Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten / Kota yang menjadi kegiatan bagi bidang – bidang BKKBN perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan bidang – bidang DPPKBP3A sebagaimana berikut :

- a. Sekretariatan.
- b. Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk).
- c. Bidang Keluarga Berencana KR.
- d. Bidang KSPK.
- e. Bidang ADPIN.

4. Nama Kegiatan

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

5. Satuan Kerjasama Perangkat Daerah Penyelenggaran Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dengan DPPKBP3A Kabupaten Berau khususnya di laksanakan oleh beberapa Bidang yang ada di DPPKBP3A Kabupaten Berau antara lain :

- Bidang Pengendalaian Penduduk.
- Bidang Keluarga Berencana.
- Bidan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

6. Jumlah Pegawai, Kualifkasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keterlibatan dari PNS yang melaksnakan kegiatan kerjasama tersebut adalah Kepala Bidang, Kasi dan Staf yang dapat di lihat dalam table 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
PNS DPPKBP3A Yang Melaksanakan MOU dengan
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pangkat / Gol
I	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDK			
1	Diany Syafriani, SAP. MSI	Kabid. Pengendalian Penduduk	Strata 2 (S2)	Penata Tk. I (III/d)
2	DB. Maulana, SH	Kasi Advokasi dan Pergerakan	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
3	Hj. Janiah , SE	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
4	Ngadeni, SE	Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas dan Kader KB	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
5	Winda Astuti	Staf Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas dan Kader KB	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)

	6	Sri Handayani, S.Gz.M.A.P	Staf Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Strata 2 (S2)	Penata (III/c)
II.	BIDANG KELUARGA BERENCANA				
	1	Dewi Rahmasari, S.Psi, M.Si	Kabid. Keluarga Berencana	Strata 2 (S2)	Pembina (IV/a)
	2	Deddi Zamrudi, SP	Kasi Jaminan Pelayanan KB	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
	3	H. Masruhin	Kasi Distribusi ALOKON	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
	4	Suwondo	Kasi Pembinaan dan Kesertaan KB	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
	5	A. Mariatul Kiptiah	Staf Pembinaan dan Kesertaan KB	Sarjana (S1)	Penata Muda (III/a)
	6	Zulfikurrahman	Staf Distribusi ALOKON	SLTA	Pengatur (II/c)
	7	Achmad	Staf Jaminan Pelayanan KB	SLTA	Pengatur (II/c)
III	BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA				
	1	Dewi Susanti DP,SH	Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sarjana (S1)	Pembina (IV/a)
	2	Marlianti, S.Pd	Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
	3	Saniah	Kasi Bina Ketahanan Keluarga	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
	4	Hefni Irawan, SE	Kasi Bina Ketahanan Remaja	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
	6	Juansyah	Staf Bina Ketahanan	SLTA	Pengatur Tk I

			Remaja		(II/d)
--	--	--	--------	--	--------

7. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

8. Sasaran Strategis

- Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
- Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)
- Menurunnya kebutuhan ber – KB yang tidak terpenuhi (Un met Need)
- Menurunnya Angka Kelahiran Remaja
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga
- Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan

9. Indikator Kinerja

- Angka kelahiran total (total Fertiliti rate / TFR) per WUS usia 15-40 thn. Target 2020 adalah 2,17 %
1. Angka Prevelansi kontrasepsi modern (Modern contraceptive prevalence rate / CPR) target 2020 adalah 68,21 %
2. Presentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Target Tahun 2020 adalah 21,28 %
- Presentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmed need) Target tahun 2020 adalah 8,33 %
- Angka kelahiran remaja (umur 15 -19 tqhun) Target gtahun 2020 sebesar 16 %
- Indek Pembangunan Keluarag (IPK) Target Tahun 2020 adalah 55,73 %
- Median usia kawin pertama perempuan (MKJP) usia 25 – 49 tahun target 2020 adalah 21,90 %

10. Permasalahan dan Solusi

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kerjasama antara DPPKBP3A Kabupaten Berau dengan Perwakilan BKKPN Provinsi Kaltim tahun anggaran 2020 dalam Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat berjalan dengan baik dan dapat di kerjakan secara maksimal namun masih adanya permasalahan permasalahan di lapangan yang tak terduga dan tidak terfasilitasinya , permasalahan secara keseluruhan dari semua program kegiatan tersebut antara lain :

Permasalahan yang di hadapi :

1. Dikarenakan adanya Pandemi Covid - 19 banyak kegiatan yang tidak dapat di laksanakan dengan mengumpulkan orang banyak dan jadwal kegiatanpun banyak yang di geser dan kegiatan banyak yang dirubah di sesuaikan dengan kondisi.
2. Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum Optimal.
3. Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan.
4. Masih tingginya jumlah anak yang di inginkan dari setiap keluarga.
5. Belum optimalnya komitmen stakeholders terhadap program KB dan KR.

Solusi :

1. Dilakukan kegiatan melalui kegiatan Virtual atau Zoom meeting antara BKKBN dengan DPPK.
2. Akan terus melaksanakan sosialisasi melalui Peningkatan Peran Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Toma) dalam promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi dan juga akan terus melaksanakan penguatan akses dan kualitas pelayanan KB jalur Pemerintah, Swasra dan Wilayah Khusus.
3. Melakukan pemantapan pedoman Standar Pelayanan KB di tingkat Faskes dan Provider akan di bentuk.
4. Peningkatan Akses Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di faskes kesehatan dan kelompok kegiatan.
5. Akan dilaksanakannya Sosialisasi Kesehatan Reproduksi di Kampung KB dengan pendekatan 4 Terlalu :
 - a. Terlalu muda melakukan.
 - b. Terlalu tua melahirkan.
 - c. Terlalu rapat jarak melahirkan.
 - d. Terlalu banyak melahirkan.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (LSM, Lembaga Sosial, Universitas) .

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dalam melaksanakan urusan Perlindungan Perempuan dan anak melakukan hubungan kerja koordinasi dengan beberapa instansi

vertical terkait dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, serta dalam hal pencegahan terjadinya tidak kekerasan terhadap anak juga melakukan koordinasi dengan sekolah dan yayasan yang ada di Kabupaten Berau. antara lain :

1. Forum Koordinasi

DPPKBP3A dengan membuat kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Berau, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, Kepolisian Resort Berau dan Rumah Tahanan Tanjung Redeb, Dengan Nomor : 180/9-PRJJ/HK/2016. Nomor 1018.U6/574/UM.08.4/UI/2016. Nomr: B-1017/Q4.14/GS/06/2016. Nomor : B/12/VI/2016 dan Nomor : W18.ED.UM.01.01-282. Tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tanjung Redeb, 30 Juni 2016. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak di tanda tangannya kesepakatan ini oleh para pihak dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

2. Materi Koordinasi

Adapun ruang lingkup koordinasi atau kesepakatan bersama meliputi perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada Anak Bermasalahan Hukum (ABH)

3. Instansi Vertikal yang terlibat

- a. Pemerintah Kabupaten Berau
- b. Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau
- d. Kepolisian Resort Berau
- e. Rumah Tahanan Tanjung Redeb

4. Satuan Kerjasama Perangkat Daerah Penyelenggaran Koordinasi dengan instansi vertikal

Koordinasi instansi vertikal dengan DPPKBP3A Kabupaten Berau khususnya di laksanakan oleh Bidang yang ada di DPPKBP3A Kabupaten Berau antara lain :

- Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keterlibatan dari PNS yang melaksanakan Koordinasi instansi vertikal tersebut adalah Kepala Bidang, Kasi dan Staf yang dapat di lihat dalam table 4.2 di bawah ini

Tabel 4.2

**PNS DPPKBP3A Yang Melaksanakan Koordinasi dengan
Instansi Vertikal**

No	Nama		Jabatan	Pendidikan	Pangkat / Gol
I	BIDANG Perlindungan Perempuan dan Anak				
	1	Yayuk Yulianti, Si. Apt	Kabid. PPA	Sarjana (S1)	Pembina (IV/a)
	2	Rizki Arlini, SE	Kasi Tumbuh Kembang Anak	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
	3	Dra. Hj. Mariusna	Kasi Perlindungan Anak	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
	4	Helmadawati, SE	Kasi Perlindungan Perempuan	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d))
	5	Ernawati, SE	Staf Kasi Perlindungan Anak	Sarjana (S1)	Penata Muda (III/a)
	6	Ari Usman	Staf Kasi Perlindungan Perempuan	SLTA	Pengatur (II/c)